

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional pada dasarnya merupakan interaksi antar aktor internasional yang melewati batas negara dengan tujuan pencapaian kepentingan tertentu. Teori hubungan internasional adalah studi hubungan internasional dari sudut pandang teoretis, yang digunakan untuk memahami dan menganalisis secara tepat terkait fenomena yang sedang terjadi di dunia, sedangkan hubungan internasional itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antarnegara, peran segenap negara, organisasi antarpemerintah, organisasi non-pemerintah/*Non-Governmental Organization* (NGO), organisasi non-pemerintah internasional/*International Non-Governmental Organization* (INGO) dan perusahaan multinasional/*Multinational Corporation* (MNC) (Jackson & Sorensen, 2012: 3).

Pengakuan terhadap studi Hubungan internasional secara mandiri muncul atas perhatian terhadap akibat dari Perang Dunia Pertama, di mana Perang Dunia Pertama telah banyak menelan korban manusia serta kerusakan-kerusakan materil. Akibatnya timbul kesadaran betapa pentingnya kebutuhan untuk mencegah peperangan dan terselenggaranya ketertiban dunia (Darmayadi, 2015: 19).

Terkait akan hal itu, studi hubungan internasional merupakan kajian yang sudah lama ada, namun studi hubungan internasional berkaitan dengan

perkembangan studi ilmu-ilmu sosial, seperti sejarah, antropologi, hukum dan juga politik. Sejak Perang Dunia Pertama telah banyak diterbitkan buku-buku baku (*text book*) yang mencoba dan berusaha untuk mengadakan semacam integrasi dalam pokok bahasan studi ini dengan mempergunakan pelbagai macam nama, seperti:

1. *International Politics* (Politik Internasional)
2. *International Relations* (Hubungan Internasional)
3. *World Politics* (Politik Dunia)
4. *International Organization* (Organisasi Internasional)
5. *International Government* (Pemerintahan Internasional)
6. *International Psychology* (Psikologi Internasional)

Namun, usaha untuk mengintegrasikan semua sudut pandang atau semua disiplin yang menyumbangkan bagiannya tidak dapat dikatakan berhasil. Sehingga terdapat pula usaha-usaha lain untuk mengembangkan ilmu hubungan internasional ini (Darmayadi, 2015: 19). Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa ilmu hubungan internasional merupakan ilmu yang tidak sama dengan ilmu sosial lain, namun mendapat pengaruh dari ilmu sosial lain.

Tujuan negara dan *power* tidak dapat dipisahkan, karena tujuan setiap aktor adalah *power*. Hal ini selaras dengan pernyataan Arnold Schwarzenberger, yang menyatakan bahwa negara dalam sistem internasional akan melakukan apa yang mereka kuasai secara fisik lebih daripada apa yang seharusnya mereka lakukan secara moral (Perwita & Yani, 2014: 13).

Banyak isu-isu yang telah muncul dalam hubungan internasional selama bertahun-tahun dan secara luas mencakup bidang-bidang berikut:

1. *States and Their Relationship*. Hubungan antar negara selalu membuat politik internasional menjadi mungkin.
2. *Non-State Actors*. Aktor non-negara seperti multinational cooperation (MNC), organisasi internasional non-pemerintah (INGO), dan organisasi antar pemerintah (IGOs) memiliki pengaruh yang cukup besar dalam hubungan internasional kontemporer.
3. *International Political Economy (IPE)*. Dengan dimulainya globalisasi sejak pertengahan 1980an, minat baru terhadap IPE telah berkembang.

Isu-isu dalam hubungan internasional sendiri telah disimpulkan dalam suatu laporan yang diterbitkan oleh *Council On Foreign Relations* pada tahun 1947, Grayson Kirk telah membuat kesimpulan bahwa terdapat lima unsur yang merupakan pokok dalam kuliah dasar tentang hubungan internasional, yaitu:

1. Sifat dan berlakunya atau pelaksanaan sistem kenegaraan.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi dan menentukan kekuatan (*power*) dari suatu negara.
3. Posisi internasional dan politik luar negeri dari negara-negara besar.
4. Sejarah hubungan internasional yang baru lampau.
5. Pembentukan suatu tertib dunia (*world order*) yang lebih stabil (Darmayadi, 2015:26).

Setelah beberapa pengertian teori diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari hubungan internasional adalah pemenuhan kepentingan nasional yang

dipenuhi dari luar dengan cara melakukan kerja sama antar negara. Salah satu contohnya seperti fenomena penelitian yang peneliti sajikan pada tulisan kali ini adalah kepentingan Amerika Serikat terhadap Israel dibawah kepemimpinan Donald Trump.

2.1.1.1 Hubungan Bilateral

Dalam hubungan internasional, seperti yang sudah dijelaskan diatas, suatu negara melakukan kerja sama dengan negara lain adalah untuk upaya pemenuhan kepentingan nasionalnya. Adapun bentuk-bentuk interaksi dalam hubungan internasional antara lain dibedakan menjadi hubungan bilateral, trilateral, regional, dan multilateral. Dalam penelitian kali ini, peneliti fokus terhadap hubungan bilateral yang memiliki arti dimana hubungan yang saling mempengaruhi/timbal balik antar dua pihak. Pola-pola yang terbentuk dari proses interaksi, dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan timbal balik tersebut dibedakan menjadi pola kerja sama, persaingan dan konflik (Perwita dan Yani, 2014: 42). Dengan demikian, hubungan bilateral merupakan perjanjian yang telah disepakati oleh dua negara baik di bidang politik, keamanan pertahanan, ekonomi, kebudayaan dan pendidikan.

Hubungan bilateral ini pun dapat dimaknai sebagai interaksi kerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Definisi kerja sama menurut Holsti dapat dibagi menjadi lima, yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan dua atau lebih nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, yang berusaha untuk dipenuhi oleh semua pihak.

2. Persetujuan atas masalah tertentu antar dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan benturan kepentingan.
3. Harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lain membantu negara itu untuk mencapai kepentingannya.
4. Aturan resmi atau aturan tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan tujuan.
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Holsti, 1988:652-653).

Pola-pola yang terbentuk dari proses interaksi, dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan timbal balik tersebut dibedakan menjadi pola kerja sama, persaingan dan konflik (Perwita dan Yani, 2014: 42). Rangkaian pola hubungan aksi reaksi ini meliputi proses sebagai berikut:

1. Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai.
2. Persepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
3. Respon atau aksi balik dari negara penerima.
4. Persepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa.

Realisasi hubungan bilateral negara diaplikasikan melalui hubungan diplomatik sebagai bentuk hubungan formal antar kedua negara. Bagi negara manapun tujuan utama diplomasinya adalah pengamanan kebebasan politik dan integritas teritorialnya. Ini bisa dicapai dengan memperkuat hubungan dengan negara sahabat, memelihara hubungan erat dengan negara-negara yang sehaluan

dan menetralkan negara yang memusuhi (Jackson & Sorensen, 2009: 34). Persahabatan bisa dibina dan sahabat-sahabat baru diperoleh melalui negosiasi yang bermanfaat. Ini akan lebih mudah apabila terdapat kesamaan kepentingan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan bilateral adalah kerja sama antara kedua belah pihak yang masing-masing pihak memiliki kepentingan untuk pemenuhan nasionalnya. Seperti fenomena yang peneliti kali ini teliti, hubungan antara Amerika Serikat dengan Israel pasti masing-masing pihak memiliki kepentingan untuk dicapai, salah satu caranya adalah kerja sama yang telah lama mereka lakukan.

2.1.2 Kepentingan Nasional

Untuk memahami lebih jauh mengenai hubungan internasional, konsep kepentingan nasional perlu dimengerti agar kita dapat memahami perilaku internasional. Para ahli mengemukakan bahwa “negara bertindak atas kepentingan nasionalnya” hal ini karena kepentingan nasional merupakan formula kebijakan suatu negara terhadap negara lain. Kepentingan nasional ini erat kaitannya dengan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Plano & Olton dalam perwita & Yani, 2014: 35).

Dalam kepentingan nasional negara sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut. Seorang ahli, Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara dipandang

sebagai pelindung wilayah, penduduk dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi-kondisi keamanan maupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat terbatas (Jackson dan Sorensen 2005: 89).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internal negara itu berada, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer dan sosial-budaya yang dimiliki negara tersebut. Kepentingan juga didasari akan suatu "*power*" yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Contohnya seperti Amerika Serikat yang melakukan formulasi kebijakan luar negeri dengan mempertimbangkan dari berbagai lembaga yang terdapat dalam tubuh pemerintah Amerika Serikat sendiri.

Pemenuhan kepentingan nasional ini dapat dicapai melalui kerja sama atau bahkan konflik dengan negara lain. Perlu diingat pula bahwa kepentingan nasional saling berbenturan satu sama lain, sehingga pada prakteknya tidak hanya bentuk kerja sama yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan nasional, adakalanya upaya pemenuhan kepentingan nasional bersifat pertentangan dan berakhir dengan konflik antar pihak.

2.1.2.1 Klasifikasi Kepentingan Nasional

Berikut enam klasifikasi kepentingan yang ingin dicapai sebuah negara menurut Thomas W. Robinson:

1. *The Primary Interests*

Kepentingan utama yang dimiliki oleh sebuah negara dan tidak bisa dikompromikan oleh negara. Didalamnya terdapat pelestarian identitas fisik, identitas politik dan budaya yang dimiliki oleh sebuah negara yang tidak dapat diganggu gugat oleh negara lain.

2. *Secondary Interests*

Walaupun berada dibawah kepentingan utama, kepentingan sekunder ini berisi eksistensi sebuah negara yang menjadi hal utama dalam kepentingan sekunder ini. Di dalamnya terdapat perlindungan warga negara di luar negeri dan kekebalan diplomatik bagi staf diplomatik.

3. *Permanent Interests*

Kepentingan yang merujuk pada kepentingan negara yang relatif konstan dan jangka panjang dimana perubahan di dalamnya agak lambat. Contohnya seperti Amerika Serikat yang telah lama memiliki hubungan dekat dengan Israel.

4. *Variable Interests*

Kepentingan di dalam suatu negara yang dianggap vital untuk kebaikan nasional dalam keadaan tertentu. Dimana terkadang menyimpang dari kepentingan permanen, Kepentingan ini dipengaruhi oleh opini publik dan

moral yang berlaku saat itu. Contoh ketika kepentingan Amerika Serikat dalam membendung Uni Soviet berhenti pasca berakhirnya perang dingin.

5. The General Interests

Kepentingan dimana sejumlah besar negara dapat menerapkannya di beberapa bidang tertentu seperti hubungan ekonomi, perdagangan, hubungan diplomatik dan lain-lain. Contohnya menjaga perdamaian adalah kepentingan umum semua negara.

6. Specific Interests

Kepentingan yang berasal dari hasil pemikiran logis. Kepentingan yang didefinisikan ke dalam waktu dan tempat. Contohnya ketika Amerika Serikat membantu negara lain dalam memerangi komunis selama perang dingin (Sharma, 2007: 127-128).

Dalam kepentingan nasional, negara sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut. Seorang ahli, Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, pelindung penduduk dan cara hidup yang khas serta berharga. Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya (Jackson dan Sorensen 2005: 89).

Seperti contohnya kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, terdapat tiga pilar utama kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah, yaitu hegemoni Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, kelompok

kepentingan AIPACI dan Israel sebagai asset strategis Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, dari sini kita dapat melihat bahwa Israel merupakan salah satu kepentingan AS dimana pada setiap kesempatannya, Amerika Serikat selalu menjadi negara pertama yang mendukung Israel (diakses pada 22 Maret 2019 melalui <http://lib.ui.ac.id/file=digital/127056-T%2023483-kerjasama%20PBB-analisis.pdf>).

2.1.3 Politik Luar Negeri

Pengertian Politik luar negeri pada dasarnya merupakan kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain dalam memperjuangkan kepentingan nasional negaranya (Perwita & Yani, 2014: 47). Dengan demikian, politik luar negeri merupakan suatu arena pertemuan setiap negara untuk pemenuhan kepentingannya masing-masing dengan melakukan kerjasama baik bilateral, regional maupun multilateral.

Tujuan kebijakan luar negeri dibedakan atas tujuan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dimana tujuan jangka panjang kebijakan luar negeri adalah untuk mencapai perdamaian, keamanan dan kekuasaan (Rosenau dalam Perwita & Yani, 2014: 51) tujuan politik luar negeri pun dikatakan sebagai citra terkait keadaan dan kondisi di masa depan suatu negara dimana pemerintah setelah melalui pemikiran dan pertimbangan perumus kebijaksanaan nasional mampu untuk mempengaruhi negara lain. Maka dari itu, Politik luar negeri suatu negara ditunjukkan untuk memajukan dan melindungi kepentingan negara itu. Di dunia yang terdiri dari banyak bangsa ini, untuk melindungi dan memajukan

kepentingan nasional, setiap bangsa harus menentukan sikapnya terhadap bangsa lain dan arah tindakan yang diambil dan dicapai dalam urusan internasional.

K.J Holsti memberika tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu:

1. Nilai (*values*) yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan.
2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dimana terdapat tujuan jangka pendek (*short-term*), jangka menengah (*middle-term*) dan jangka panjang (*long-term*).
3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain. (Russet & Starr dalam Perwita & Yani, 2014: 52).

Sumber-sumber politik luar negeri menurut Howard Lentner mengklasifikasikannya ke dalam dua kelompok, yaitu determinan luar negeri dan determinan domestik (Lentner dalam Perwita & Yani, 2014:55). Sedangkan menurut James N. Rosenau sumber-sumber utama yang menjadi input dalam perumusan kebijakan luar negeri, yaitu:

1. Sumber sistemik (*systemic sources*), merupakan sumber yang berasal dari lingkungan eksternal suatu negara. Sumber ini menjelaskan struktur hubungan antara negara-negara besar, pola-pola aliansi yang terbentuk antara negara-negara dan faktor situasional eksternal yang dapat berupa isu area atau krisis. Yang dimaksud dengan struktur hubungan antara negara besar adalah jumlah negara besar yang ikut andil dalam struktur hubungan internasional dan bagaimana pembagian kapabilitas di antara mereka. Sementara faktor situasional eksternal

merupakan stimulan tiba-tiba yang berasal dari situasi internasional terakhir.

2. Sumber masyarakat (*societal sources*), merupakan sumber yang berasal dari lingkungan internal. Sumber ini mencakup faktor kebudayaan dan sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial dan perubahan opini publik. Kebudayaan dan sejarah mencakup nilai, norma, tradisi dan pengalaman masa lalu yang mendasari hubungan antara anggota masyarakat. Pembangunan ekonomi mencakup kemampuan suatu negara untuk mencapai kesejahteraan sendiri.
3. Sumber Pemerintahan (*governmental sources*), merupakan sumber internal yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban politik dan struktur dalam pemerintahan. Pertanggungjawaban politik seperti pemilu, kompetisi partai dan tingkat kemampuan dimana pembuat keputusan dapat secara fleksibel merespon situasi eksternal. Sementara dari struktur kepemimpinan dari berbagai kelompok dan individu yang terdapat dalam pemerintahan.
4. Sumber Idiosinkratik (*idiosyncratic sources*), merupakan sumber internal yang melihat nilai-nilai pengalaman, bakat serta kepribadian elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri. Disini tercakup juga persepsi seorang elit politik tentang keadaan alamiah dari arena internasional dan tujuan nasional yang hendak dicapai (Rosenau dalam Perwita & Yani, 2014:57-58).

Saat ini, dalam fenomena hubungan internasional untuk menjelaskan politik luar negeri adalah ketika sebuah negara melakukan kemitraan strategis dengan negara lain melalui sebuah kerja sama. Contohnya seperti Amerika Serikat dengan Israel dalam kerja sama bidang kemiliteran, setiap tahun Amerika Serikat selalu memberi dukungan bantuan dana dalam bidang militer kepada Israel.

2.1.3.1 Kebijakan Politik Luar Negeri

Analisis kebijakan luar negeri adalah kajian manajemen hubungan dan aktivitas eksternal suatu negara. Kebijakan luar negeri melibatkan tujuan, strategi, ukuran, metode, panduan, arahan, perjanjian dan lain-lain. Pemerintah dapat melakukan hubungan internasional dengan negara-bangsa lain, organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah (Jackson & Sorensen, 2012: 9).

Kebijakan luar negeri menurut K.J Holsti yaitu tindakan untuk mempertahankan atau mengubah kondisi objek atau praktek dalam lingkungan eksternal. Tindakan pada dasarnya merupakan satu bentuk komunikasi untuk mengubah atau mendukung perilaku pemerintah negara lain yang berperan menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan pemerintah yang bersangkutan. (1988: 158). Sedangkan menurut Lousi Neack kebijakan luar negeri adalah keinginan, pernyataan dan tindakan dari aktor internasional yang ditunjukkan kepada aktor lainnya. (2008: 49).

Dari beberapa pengertian diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa kebijakan politik luar negeri dilakukan karena keterbatasan sebuah negara dalam memenuhi kebutuhan negaranya baik dalam hal ekonomi, pembangunan maupun teknologi.

2.1.4 Kerjasama Internasional

Seperti yang telah dipaparkan diatas, selain kerja sama internasional terdapat pula konflik internasional yang merupakan aspek dalam hubungan internasional. Untuk melakukan kerja sama dibutuhkan sebuah wadah memperlancar kegiatan kerja sama. Persamaan kepentingan dari masing-masing negara merupakan tujuan dari kerja sama. Kerja sama internasional ini dapat terjadi dalam berbagai bidang, seperti kebudayaan, lingkungan hidup, ideologi, politik sosial, ekonomi, keamanan dan pertahanan.

Kerjasama internasional diperoleh oleh kedua pihak atau lebih berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama dari kepentingan yang mendukung konsepsi tindakan unilateral dan kompetitif. Karena tidak dapat dipenuhinya berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa maka kerjasama internasional menjadi faktor penting dalam negara (Perwita & Yani, 2005: 33-34). Berikut adalah bentuk-bentuk dari kerja sama internasional:

a. Kerja sama Bilateral

Kerja sama dilakukan antara dua negara. Faktor utama dalam kerja sama bilateral adalah perdagangan, hubungan diplomatik, perdagangan dan kebudayaan. Kerja sama bilateral cenderung lebih mengutamakan pendekatan secara kekerabatan, seperti memberikan bantuan berupa dana untuk fasilitas kegiatan ataupun berupa pinjaman. Contohnya seperti yang

dilakukan Amerika Serikat seperti mengirim bantuan dana militer setiap tahun kepada Israel.

b. Kerja sama Regional

Dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah. Kerja sama ini biasanya dilakukan dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan (contohnya ASEAN/*Association of Southeast Asian Nations* dan European Union/Uni Eropa).

c. Kerja sama Multilateral

Dilakukan oleh beberapa negara dalam bidang tertentu, diantaranya bidang ekonomi (APEC/*Asia-Pacific Economic Cooperation*), sosial (ILO/*International Labour Organization*, WHO/*World Health Organization*), pertahanan dan keamanan (NATO/*North Atlantic Treaty Organization*) (Djelantik, 2008: 85-87).

Setelah memahami pengertian-pengertian diatas, setiap negara untuk mencapai tujuannya tentu akan melakukan kerja sama dengan negara lain karena keterbatasan negara dalam memenuhi kepentingannya sendiri, meskipun negara *super power* sekalipun seperti Amerika Serikat. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa kerjasama hanya akan terjadi, karena adanya saling ketergantungan antar negara-negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam fokus studi hubungan internasional, objek yang dipelajari adalah *nation-state actor* dan *non-state actor* (organisasi internasional, individu, dan kelompok individu). Bentuk interaksi dapat bersifat simetris antar aktor negara

ataupun antar aktor non-negara maupun non simetris dimana negara dapat berinteraksi dengan aktor non-negara (Darmayadi, dkk. 2015: 44-45).

Setiap negara tentu memiliki tujuan dan kepentingan nasional yang harus dicapai, untuk itu setiap negara tentunya menjalin kerja sama dengan negara lain. Konsep kepentingan nasional perlu dimengerti agar kita dapat memahami perilaku internasional. Para ahli mengemukakan bahwa “negara bertindak atas kepentingan nasionalnya” hal ini karena kepentingan nasional merupakan formula kebijakan suatu negara terhadap negara lain. Kepentingan nasional ini erat kaitannya dengan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Plano & Olton dalam perwita & Yani, 2014: 35). Hal ini terlihat dari Amerika Serikat yang memiliki kepentingan atas Israel.

Kepentingan nasional Amerika Serikat, dalam bidang keamanan antara lain, pertama, untuk melindungi kepentingan vital dan mengamankan perdamaian, mencegah agresi, mencegah, meredakan, dan mengelola krisis, menghentikan proliferasi senjata pemusnah massal dan memajukan kontrol dan pelucutan senjata, yang kedua ialah untuk menjaga kestabilan lokal dan regional yang tidak mengancam keamanan dan kesejahteraan Amerika Serikat atau sekutunya dan yang ketiga yaitu mengurangi ancaman Senjata Pemusnah Massal (<https://www.state.gov/s/d/rm/rls/perfrpt/2002/html/18996.htm> diakses pada 8 mei 2019).

Bagi Israel sendiri, tujuan kerja sama ini pun untuk keamanan nasional negaranya, Israel yang berada dikawasan Timur Tengah yang berada ditengah

negara-negara Arab terancam keamanannya. Banyak pertentangan yang muncul dari negara-negara Arab terkait deklarasi berdirinya sebuah negara Israel, selain itu konflik yang tidak berkesudahan antara Israel dengan Palestina, dimana organisasi Liga Arab dengan negara-negara Arabnya mendukung Palestina dan menentang Israel, yang merupakan ancaman bagi berdiri dan berdaulatnya negara Israel. Mengenai kepentingan nasional bagi kedua belah pihak, pernah dijelaskan dalam buku *The United States in the Middle East*, Michael C. Hudson memaparkan analisis kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, yaitu minyak dan Israel, ketergantungan Amerika Serikat terhadap minyak juga berpengaruh terhadap daya ekonomi Amerika Serikat, minyak sebagai sumber daya yang dibutuhkan dalam memproduksi berbagai produk seperti senjata, bahan bakar, produksi barang dan lainnya.

Hubungan antara Amerika Serikat dengan Israel bermula pada tahun 1948 ketika Amerika Serikat sebagai negara pertama yang mengakui Israel sebagai sebuah negara. Selain telah menyatakan bahwa Amerika Serikat adalah negara pertama yang mengakui Israel pada tahun 1948, Amerika Serikat pun adalah yang pertama mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel pada tahun 2017.

Dalam hubungan internasional, interaksi antar negara tidak hanya melalui kerja sama, pada kenyataannya, dalam mencapai tujuan nasional masing-masing negara, adakalanya muncul konflik yang tidak dapat terelakkan. Konflik dapat terjadi karena perbedaan kepentingan serta perbedaan nilai yang dianut. Perbedaan kepentingan atau kepentingan nasional setiap negara tentu berbeda dan seringkali berbenturan dalam prakteknya.

Salah satu konflik dalam hubungan internasional yang memiliki sejarah panjang adalah perebutan kota Yerusalem antara Israel dan Palestina yang membawa konsekuensi tersendiri terhadap perjalanan sejarahnya. Yerusalem telah menjadi ajang persengketaan dari waktu ke waktu. Hingga tulisan ini dibuat, telah berbagai macam cara penyelesaian ditempuh namun masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

Dibawah kepemimpinan Donald Trump, beberapa hal-hal kontroversial dilakukan Trump terkait Israel, Ia berhasil mewujudkan salah satu janji kampanye Presiden Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel serta menggunakan setengah dari hak veto yang telah digunakan Amerika Serikat dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melindungi Israel.

Status Yerusalem yang diperebutkan tersebut adalah wilayah yang berada di bawah kewenangan internasional, dan diberikan status hukum dan politik yang terpisah (*separated body*). Resolusi ini juga memberikan mandat berdirinya negara Arab (Palestina) dan negara Yahudi (Israel) yang masing-masing berstatus merdeka (UN document, 'Chapter 12: The Status of Jerusalem':9). Akibat dari pengakuan tersebut pun ialah muncul adalah keputusan tersebut memicu terjadinya ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah dan mengganggu proses perdamaian antara Israel dan Palestina.

Hal kontroversial lain ialah dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dari penggunaan hak veto dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dari total 82 kali hak veto yang digunakan oleh Amerika Serikat, sebanyak 42 kali

digunakan untuk melindungi Israel dari resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Malcolm dalam Sangga, 2017:7).

Untuk itu, peneliti tertarik meneliti kepentingan Amerika Serikat dengan kebijakan '*first America Policy*' dibawah kepemimpinan Donald Trump terhadap Israel yang saat ini lebih 'dekat' dan 'kuat' dalam hal kerja sama antar dua negara dibandingkan dengan presiden Amerika Serikat sebelumnya, bahkan tindakan-tindakan kontroversial ditempuh Amerika Serikat dalam menjaga keamanan Israel.

Berikut kerangka pemikiran yang penulis sajikan yang diharapkan dapat memberi gambaran secara utuh dan menyeluruh atas penelitian kali ini:

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran

